



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NEVRITA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 851135

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.800.000.000**

1. Tanah Seluas 253 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **213.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI AV1414F STD 4X 2MT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 82.000.000
2. MOBIL, KIA VISTO MT Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000



3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, YAMAHA IUB A/T / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	140.156.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	118.866.716
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.272.022.716
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.272.022.716

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.